

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Andi Etteng Ma`ruf

NPP. 29.1434

*Asdaf Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: andyettengmaruf@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is entitled Implementation Of Policy For Security And Maintenance Of Regional Property At The Education Office Of The City Of Palu. The existence of a regional autonomy government policy immediately requires each province, district, and city to carry out financial management and accountability individually. This causes local governments to be responsible for managing regional property. In the process, many problems arise in the security and maintenance of regional property such as lost regional property or conditions that are no longer suitable for use. **Purpose:** The purpose of this study is to collect data and then analyze it to obtain results that can provide an overview of how the implementation of the policy on security and maintenance of regional property is carried out, knowing what factors are inhibiting and supporting the implementation of the policy of securing and maintaining regional property. The theory used to analyze is Ripley and Franklin's theory of policy implementation. Factors that can determine the success of a policy implementation are the level of compliance, smooth routine functions, and the realization of the desired performance and impact. **Method:** The research design used in this research is qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques used three ways, namely, interviews, observation, and documentation. The data that has been collected is then analyzed starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of this study as well as the implementation of policies on security and maintenance of regional property at the Palu City education office have been carried out well after research with the theories and methods used. **Conclusion:** From the results of this study, it can be concluded that the implementation of the policy for securing and maintaining regional property has been carried out, however, there are still obstacles in implementing the policy. For this reason, the authors suggest that it is better in the implementation of the maintenance of goods to be considered again and increase the number of goods managers to optimize the implementation of the policy.

Keywords: Assets, Implementation, Policy, Regional Property, Security and Maintenance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Palu. Adanya kebijakan pemerintah otonomi daerah dengan segera mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam prosesnya banyak timbul permasalahan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah seperti adanya barang milik daerah yang hilang atau kondisinya yang sudah tidak layak guna. **Tujuan:** Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. Faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini sebagaimana Implementasi Kebijakan Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Palu telah terlaksana dengan baik setelah dilakukannya penelitian dengan teori dan metode yang digunakan. **Kesimpulan:** dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah telah terlaksana namun, masih ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk itu, penulis memberikan saran untuk sebaiknya dalam pelaksanaan pemeliharaan barang untuk diperhatikan lagi dan menambah jumlah pengurus barang untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci: Aset, Barang Milik Daerah, Implementasi, Kebijakan, Pengamanan dan Pemeliharaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan roda pemerintahan. Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat itu sendiri atau untuk menyusun peraturan-peraturan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien

sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat, yang turut menunjang berjalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan benar untuk membentuk pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan efisien. Pengelolaan barang milik daerah merupakan unsur penting di bidang administrasi dan ketatausahaan di satuan kerja perangkat daerah. Pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan administrasi dan inventarisasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah mengenai pengelolaan BMD masih sering ditemukan. Pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, ditemukan bahwa ada beberapa permasalahan mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Dalam hal ini, sebagian besar pemerintah daerah kurang optimal dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sangat diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah untuk menjaga kondisi dan menjaga semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana kondisi yang diharapkan. Dalam prosesnya banyak timbul permasalahan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah seperti adanya barang milik daerah yang hilang atau kondisinya yang sudah tidak layak guna. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh pengguna barang milik daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kota Palu pada barang milik daerahnya tidak memiliki tanda kepemilikan atau kode barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, ada juga barang yang kondisinya tidak terpelihara. Pada tanggal 28 september 2018 terjadi bencana alam gempa yang berkekuatan 7,4 SR di kota palu sehingga menyebabkan tsunami di Kota Palu. Bencana ini pun banyak menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana publik yang ada. Tentunya hal ini juga berdampak pada kondisi barang milik daerah terutama pada Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Palu. Dewasa ini ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada di SKPD Pemerintahan Kota Palu khususnya pada Dinas Pendidikan Kota Palu dimana barang milik daerah belum terkoordinir dengan baik. Misalnya permasalahan pengamanan dan pemeliharaan, adanya barang yang tidak diketahui keberadaannya, juga terdapat barang yang kurang diperhatikan pemeliharaannya. Berdasarkan table dibawah berikut ini menunjukkan bahwa ada beberapa barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi kebijakan

dan dalam konteks pengelolaan barang milik daerah. penelitian pertama oleh *kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan*, Duma S Simamora (2020). Penelitian ini mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian kedua Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang), Siti Amerieska, Fita Setiati, Imam Mulyonos (2018). Secara khusus yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan pengelolaan BMD. Penelitian ini menggunakan metode Desain eksploratif. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu, Deissy Mokodo Jenny Morasa, Jessy Warongan (2017) untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan siklus/proses pengelolaan barang milik daerah dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kotamobagu guna memperbaiki pengelolaan barang milik daerah agar lebih baik. Penelitian selanjutnya Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor BPKAD Provinsi Riau, Arif Kurnia Rahman (2020). Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau. Penelitian selanjutnya Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Afri Zulaymi (2010). Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah pada bagian perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Karimun. Analysis Of Local Government Fixed Asset Management Based On Regulation Of The Minister Of Domestic Affairs Number 19 Year 2016, Eka Fitriyani and Rahmat Yuliansyah (2020) Untuk mengetahui apakah pengelolaan aset tetap di daerah pemerintah DKI Jakarta sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016. Analysis of Regional Property Management in Public Organization in Indonesia. Tujuannya untuk menganalisis pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini penggunaan dan pemanfaatan barang di BPKD dan Kabupaten Kepulauan Talaud terkait Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 02 Tahun 2012. Effectivity and Efficiency of Regional Property Management Results and Financial Performance, Tasyaa'u Mulka Thafaki (2018). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan hasil yang mencerminkan kinerja keuangan BUMD di Kota Semarang, periode 2014- 2016. Local asset management: Overview of policy implementation Study at the Bandung District Health Office, Mochamad Guntur, Ria Arifianti, Candradewini (2021). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. The Quality of State-Property Reporting: Determinants and Intervening Role of Optimization Management in Indonesia Regional Case, Indah Anisykurillah and Anggita Oktaviana (2020). Untuk menguji pengaruh legal audit, sistem pengendalian Internal, peran auditor sebagai penentu kualitas laporan barang milik negara, dan peran media optimalisasi manajemen.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada DINas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat Ripley dan Franklin mengenai teori implementasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui serta mendeskripsikan implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas pendidikan Kota Palu, mengetahui faktor pendukung penghambat dalam implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas pendidikan Kota Palu, dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi dalam implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas pendidikan Kota Palu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Pengurus Barang. Adapun informan ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi Adapun analisisnya menggunakan pendapat Ripley dan Franklin mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display* data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada DINas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan pendapat Ripley dan Franklin mengenai teori implementasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan mengacu pada apakah seorang implementor mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan. Di dalam sebuah kebijakan, termasuk di dalamnya perda Kota Palu nomor 7 tahun 2017 yang diimplementasikan, ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan sebuah kebijakan. Beberapa kriteria menggambarkan kondisi aktual implementasi kebijakan, seperti sejauh mana semua elemen mematuhi prosedur yang diatur dalam aturan serta perilaku pelaksana kebijakan.

a. Pemahaman Implementor

Untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap suatu kebijakan, sudah seharusnya implementor harus memahami dulu pada kebijakan tersebut agar dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat sesuai dengan

apa yang diharapkan. Pemahaman yang baik terhadap suatu kebijakan akan menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Mekanisme dan aturan yang ada dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu No.07 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pengamanan barang milik daerah tercantum pada pasal 68 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dan Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Dari pasal tersebut diamati bahwa implementor memahami dan mematuhi dengan baik prosedur pengelolaan barang milik daerah dalam pengamanan barang milik daerah karena setiap aset memiliki bukti kepemilikan berupa surat tertulis dan *labelling* pada barang milik daerah yang ada.

b. Perilaku Implementor

Dalam hal ini perilaku implementor kebijakan adalah aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan atau dilakukan implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Baik itu telah sesuai dengan prosedur yang ada atau belum, itu semua telah termasuk dalam perilaku implementor. Dalam kebijakan pengamanan dan pemeliharaan padi Dinas pendidikan Kota Palu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu No.07 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Maka dari itu segala tindakan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian, dalam pemeliharaan barang, kegiatan atau tindakan dilakukan agar semua barang selalu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan secara efisien dan produktif. Jika barang di area tersebut digunakan dengan pihak lain, biaya perawatan akan ditanggung sepenuhnya oleh penyewa atau peminjam. Barang-barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang-barang yang dicatat dalam buku inventaris. Untuk menjaga ketertiban pemeliharaan, setiap barang di area tersebut harus memiliki catatan perawatan/pemeliharaan yang mencakup nama item inventaris, spesifikasi tanggal layanan, jenis pekerjaan, atau pemeliharaan pemeliharaan, barang atau bahan yang digunakan, biaya pemeliharaan/pemeliharaan, siapa melakukan perawatan/perawatan, dll. Jika telah dilakukan pemeliharaan, tanda pemeliharaan/servis harus diperiksa oleh panitia pemeriksa barang BPKPAD, setelah itu hasil pemeriksaan tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh komisaris badan pemeriksaan barang. BPKPAD kemudian mengumpulkan seluruh kinerja pemeliharaan dan melaporkannya kepada kepala daerah. Akibatnya, setiap pemeliharaan barang di daerah tersebut diselaraskan dengan persyaratan yang ditetapkan. Fungsi pemeliharaan barang milik daerah yaitu dapat mengurangi terjadinya kerusakan atau pengurangan kualitas terhadap barang milik daerah sehingga pemeliharaan ini sangat diperlukan, namun masih ada barang yang tidak terawat atau terpelihara.

3.2. Lancarnya Rutinitas Fungsi

Berhasilnya Implementasi Kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang milik daerah juga dapat dilihat dari lancarnya rutinitas fungsi. Berhasilnya suatu kebijakan dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi. Apabila di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan belum berhasil.

a. Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan

Pada setiap organisasi kelancaran rutinitas fungsi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, kantor dinas pendidikan kota Palu dalam urusan barang milik daerah terdiri dari pengguna barang dan pengurus barang. Koordinasi antara implementor kebijakan ini harus berjalan dengan baik untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Kota Palu. Koordinasi yang dilakukan antar pengurus dan pengguna barang milik daerah yang ada pada dinas pendidikan kota Palu sudah tergolong baik. Kemudian komunikasi Pengurus Barang dengan Pengguna Barang yang dilakukan yaitu terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. hubungan kerja antar pelaksana kebijakan pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Palu berjalan dengan baik. Dengan tercapainya hubungan yang baik dan antar pelaksana kebijakan maka pelaksanaan rutinitas fungsi akan berjalan dengan lancar..

b. Kelancaran tugas implementor

Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Kantor Dinas pendidikan Kota Palu dapat dilihat dengan kelancaran pelaksanaan tugas oleh implementor kebijakan. pelaksanaan tugas dalam pengamanan dan pemeliharaan bmd itu terfokus pada pengurus barang dan pengguna barang. Kendala ketika pengurusan pemindahtanganan barang karena kadan pengguna barang yang sudah selesai memakai barang yang dimiliki telat membuat berita acara serah terimanya.

3.3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Kebijakan ditetapkan dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Kota Palu yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palu No.07 Tahun 2017 menghendaki kelancaran pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset, dan tercapainya pengelolaan BMD yang tertib, efisien dan efektif.

a. Implementasi Program

Implementasi dari suatu kebijakan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan itu guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam implementasinya kebijakan pengamanan dan pemeliharaan milik daerah pada Dinas pendidikan Kota Palu. Selain pengurus barang yang mengelola dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, pengguna barang juga mempunyai peran penting untuk senantiasa menjaga dan merawat barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya tetapi, fakta dilapangan yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ini adalah sumber daya manusia itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah telah diterapkan dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Palu No.07 Tahun 2017 namun, dalam penerapannya kendala yang biasa terjadi ada pada sumber daya manusianya yang terbatas. Sehingga penerapannya belum optimal.

b. Dampak dari kebijakan

Setiap kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan pasti memiliki dampak setelah diterapkan. Dalam penerapan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas pendidikan kota palu memiliki dampak yaitu mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, efisien dan efektif. Dampak dari penerapan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas pendidikan Kota Palu sudah lebih baik dari peraturan yang berlaku sebelumnya yang dimana peraturan sekarang memiliki dampak positif yaitu akuntabilitas dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, tertib dan efisien dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki.

3.4. Faktor Pendukung

a. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

Sumber daya Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) juga menjadi faktor penting agar kebijakan ini berjalansesuai rencana. SIMDA BMD juga merupakan faktor penting untuk implementasi yang benar dari kebijakan pengelolaanBMD. SIMDA itu isinya banyak tentang data-data BMD. Jadi jika kita ingin menerapkan kebijakan pengelolaan barang, hanya perlu bekerja dengan SIMDA BMD ini. Tidak perlu file-file bertumpuk satu sama lain yang sering membuat pusing karena harus diatur dengan sangat ketat dan aman. Kemudian jika menggunakan SIMDABMD juga tidak ribet dan tidak perlu menggunakan internet untuk mengaksesnya. Jadi sangat membantu. Aplikasi SIMDA BMD merupakan program aplikasi yang terintegrasi dan dapat mendukung proses pengelolaan pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kabupaten dan desa secara gratis. SIMDA merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan informasi secara cepat, akurat, lengkap, akurat dan terpadu, mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adanya SIMDA BMD menjadikan semuanya terintegrasi dan memberdayakan setiap Pengelola barang. Seperti yang diakui oleh. pengelola barang oleh dinas pendidikan ini, SIMDA BMD berguna dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengelolaan, penggunaan, pemeliharaan dan pembuangan BMD serta dapat dikelola dengan mudah.

3.4. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dikarenakan jumlah dari pengurus barang yang hanya berjumlah satu orang. salah satu hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia. dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari observasi penulis juga mendukung bahwasannya jumlah sumber daya manusia yang dalam hal ini perlu ditambah dikarenakan dapat menghambat pengimplementasian kebijakan yang ada. Penulis juga

mendukung bahwa sudah semestinya ada pembantu pengurus barang karena tugas pengurus barang sangat banyak. Di antara sekian banyak tugas pengelola barang di atas, sebaiknya pengguna barang menunjuk seorang asisten pengelola barang yang dapat membagi semua tugas di atas agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang di dinas ini berjalan dengan efisien dan efektif. Selain hambatan yang terjadi dikarenakan kurangnya jumlah pengurus barang, ada juga hambatan yang terjadi dikarenakan kurangnya disiplin pengguna barang terhadap barang yang ada dibawah kekuasaannya. Seperti yang dikatakan oleh Hermansyah bahwa —terkadang ada pengguna barang itu kurang disiplin dalam penggunaan barang seperti kendaraan dinas yang seharusnya kendaraan itu peruntukan urusan dinas tapi, dipake untuk urusan pribadi dan juga harusnya itudirawat secara berkala. Dapat diketahui bahwa dalam penggunaan barang khususnya kendaraan dinas, ada pengguna barang yang kurang disiplin dalam kendaraan dinas yang seharusnya dipakai untuk urusan dinas tapi, kenyataan dilapangan dipakai untuk keperluan pribadi dan juga kurang disiplin dalam perawatannya.

3.6. Upaya Yang Dilakukan Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

a. Melaksanakan Apel Kendaraan Dinas

Dalam rangka penertiban pengamanan dan pemeliharaan BMD khususnya kendaraan dinas, maka dilaksanakan apel kendaraan dinas pada Dinas Pendidikan Kota Palu. Dimana dilakukan pengecekan terhadap kendaraan dinas baik itu roda dua maupun roda empat. Abdul Hafid Djakarate selaku Plt. Kepala Dinas mengungkapkan dalam wawancara —dalam apel kendaraan dinas ini, semua ASN yang dipercayakan atau diberikan kendaraan dinas, kendaraannya dicek baik itu dari perawatannya hingga urusan persurataannya seperti, STNK, BPKB dan lain-lain.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Barang Milik Daerah atau BMD merupakan semua barang yang diperoleh atau dibeli dari APBN atau APBD. Untuk barang milik daerah sendiri merupakan barang hasil APBD yang dimiliki setiap Lembaga atau instansi daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Barang Mikik Daerah harus dijaga keberadaannya karena merupakan asset atau inventaris daerah yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dinas atau Lembaga termasuk Dinas Pendidikan Kota Palu. Dalam hal pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daearah sama seperti penelitian oleh Duma S. Simamora (2020) yangn membedakan yakni mengenai implementasi kebijakan pengelolaan BMD dimana pengelolaan disini mencakup secara keseluruhan termasuk pemeliharaan dan pengamanan didalamnya. Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah setelah adanya kebijakan di Kota Palu masih belum maksimal dalam pemeliharaan dan pengamanan.. Hal tersebut dapat dikatakan masih belum maksimal dalam pelaksanaannya seperti halnya dalam penelitian Siti Amerieska dkk (2018).

Ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan pengamanan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah ditetapkan Peraturan Daerah

Kota Palu No.07 Tahun 2017 yang mana seluruh pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk didalamnya pemeliharaan dan pengamanan haruslah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat seperti dalam penelitian Deissy Mokodo (2017) diaman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan siklus atau pengelolaan yang telah ditetapkan dalam regulasi khususnya di Kota Kotamobago. Dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kota Palu sebagaimana juga dilaksanakan oleh BPKAD sebagai pengelola Barang Milik Daerah pada penelitian Arif Kurnia Rahman (2020) serta juga pada penelitian Mochamad Guntur dkk (2021) dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana digunakan untuk melangsungkan jalannya kegiatan maupun program dalam meningkatkan kualitas baik dari kualitas sumber daya didalam Dinas Pendidikan maupun dalam *output* Dinas Pendidikan yakni memberikan peningkatan kualitas terhadap pendidikan di Kota Palu. Pengelola Barang Milik Daerah di Dinas Pendidikan Kota Palu dilakukan oleh Bagian Keuangan sedangkan dalam penelitian Afri Zulaymi (2010) oleh Bagian Perlengkapan.

Kendala-kendala yang didapat selama pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini pemeliharaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kota Palu No.07 Tahun 2017 seperti halnya dalam penelitian Eka Fitriyanin dan Rahmat Yuliansyah (2020) dimana Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 dimana setiap daerah lainnya juga mengikuti peraturan tersebut sebagai pedoman seperti di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan peraturan daerahnya Nomor 02 Tahun 2020. Adapaun kendala tersebut diantaranya kuantitas barang yang terdapat di Dinas Pendidikan Kota Palu serta pengurus Barang Milik Daerah yang belum maksimal dalam pengurusannya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan penanganan terhadap kendala yang terjadi yakni memberikan pelayanan maksimal dalam pemeliharaan dan pengawasan. Barang-barang yang ada perlu disesuaikan dengan apa yang telah dianggarkan untuk mencegah adanya temuan-temuan serta peningkatan kualitas sumber daya termasuk pengurus barang ataupun keseluruhan bagian yang bersangkutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah seperti halnya dalam penelitian Indah Anisykurillah dan Anggita Oktaviana (2020) tersebut agarnya dalam pelaksanaannya dapat memberikan efektivitas dan keefesienan dalam hal pengelolaan Barang milik Daerah seperti yang ada dalam penelitian Tasyaa`u Mulka Thafaki (2018).

IV. KESIMPULAN

Penulis Implementasi Kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Palu sudah sesuai dengan pedoman yang ada namun ada hal yang belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga belum bisa dikatakan optimal. Untuk mencapai kinerja dan dampak yang dikehendaki dari kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yaitu terwujudnya akuntabilitas dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, dan

terwujudnya pengamanan dan pemeliharaan barang yang tertib, efektif dan efisien. Namun, belum berjalan dengan baik dikarenakan permasalahan kuantitas pada pengurus barang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Ripley dan Franklin mengenai teori implementasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Dr.Sahya. *Pengantar Kebijakan Publik*. 2nd ed. Bandung:PUSTAKA SETIA, 2016.

Barry Buzan and Lenen Hansen. *The Evolution of International SecurityStudies*. Vol. 148. New York, 2009.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia, 2010.

Creswell JW. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches by John W. Creswell (z-Lib.Org).Pdf*. London:SAGE Publications, 2013.

Dr.Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.

Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif*. Semarang:Widya Karya, 2012.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Medan,Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Indonesia, 2004.

JayHeizer & Barry Render. *Operations Management -10th Edition 2011*.

Texas: Pearson Education, n.d.

Mendagri. *Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Indonesia: Kementrian DalamNegeri, 2016.

Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. —The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society* 6, no. 4(1975): 445–488.

Pemerintah Kota Palu. *Peraturan Daerah Kota Palu No.7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Indonesia, 2017.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2014.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: ALFABETA, 2013.

